

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

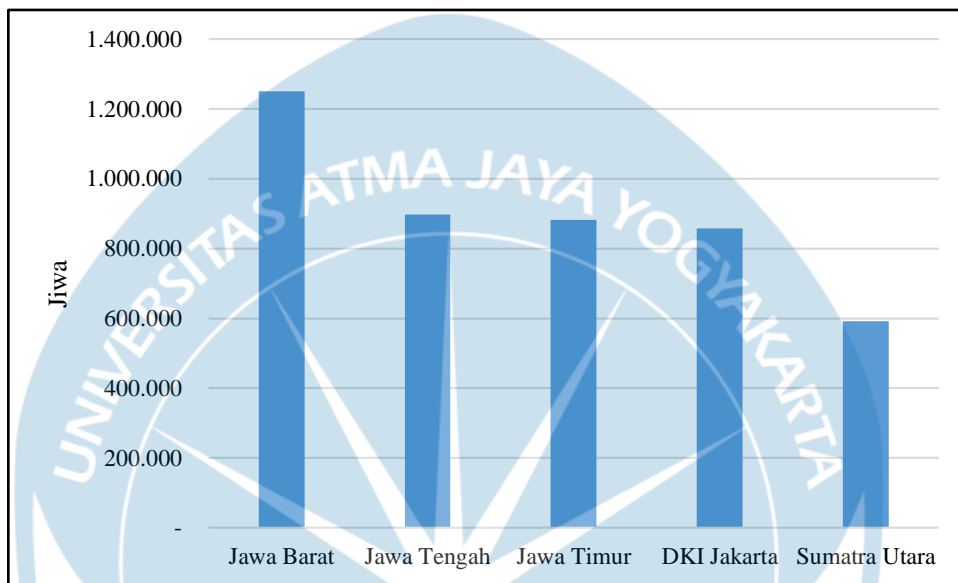
Migrasi ke luar atau biasa disebut dengan emigrasi merupakan fenomena yang penting dalam studi demografi dan pembangunan, yaitu perpindahan penduduk dari satu tempat menuju ke tempat yang lain. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang penduduknya sering melakukan migrasi ke luar dan telah menjadi bagian integral dari dinamika sosial-ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik (2019), migrasi dapat diartikan sebagai perubahan tempat tinggal secara permanen yang dapat menambah maupun mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah. Todaro dan Smith (2011) mengatakan bahwa aktivitas migrasi antara desa-kota memiliki peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi karena mempengaruhi keadaan sosial ekonomi di daerah tujuan maupun daerah asal yang mencakup perubahan jumlah dari golongan umur, tingkat pengangguran, pendidikan, dan pendapatan. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bersifat dinamis dan membawa dampak terhadap perubahan struktural dan transformasi ekonomi baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Pembangunan sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita yang relatif cepat, tersedianya lapangan pekerjaan yang luas, meratanya distribusi pendapatan, serta terciptanya kemakmuran antar daerah. Ramadhany (2021) menjelaskan bahwa tujuan utama dari migrasi adalah meningkatkan taraf hidup para migran dengan cara mencari pekerjaan yang mampu memberikan pendapatan dan status sosial yang lebih tinggi di daerah tujuan daripada daerah asal.

Migrasi desa-kota yang merupakan jenis migrasi dari sudut pandang pembangunan jangka panjang (Todaro dan Smith, 414:2011) juga menjadi migrasi yang penting dengan adanya potensi manfaat pembangunan dari aktivitas ekonomi yang terkonsentrasi di kota-kota besar serta faktor penunjang lainnya.

Migrasi biasanya dilakukan karena adanya perbedaan upah, pendidikan, biaya relokasi, serta kedudukan dan rendahnya status sosial seorang individu di daerah asalnya. Aktivitas migrasi dilakukan sebagai respon seseorang terhadap perbedaan pendapatan antara kota dan desa (Todaro dan Smith, 416:2011). Pada dasarnya, Todaro dan Smith (2011) menyatakan bahwa para tenaga kerja akan membandingkan pendapatan yang diharapkan di sektor perkotaan dengan pendapatan yang biasa diperoleh di daerah asal. Para pekerja akan melakukan migrasi apabila pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada pendapatan di daerah asal. Pendapatan yang diharapkan tentunya berkaitan dengan upah dan peluang kerja, maka dari itu migrasi biasanya akan terus berlanjut walaupun tingkat pengangguran di wilayah perkotaan cukup tinggi. Howell dalam Ilhami dan Yenniwati (2022) mengatakan bahwa migrasi berpengaruh secara signifikan dalam peningkatan pendapatan seluruh kelompok masyarakat. Tingginya permintaan pasar tenaga kerja terhadap pekerja migran yang lebih terdidik memberikan keuntungan bagi pekerja yang memiliki keterampilan tinggi sehingga pekerja tersebut dapat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah asalnya.

Pada Gambar 1.1, menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah dengan angka migrasi ke luar risen yang tinggi di Indonesia pada tahun 2020.

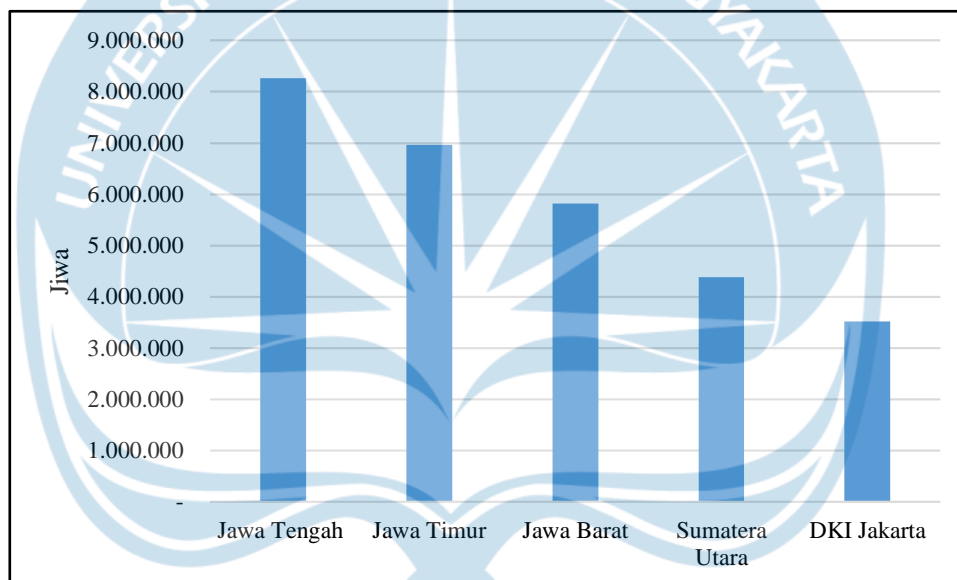


Gambar 1. 1 Lima Provinsi dengan Migrasi ke Luar Risen Terbesar Menurut Kabupaten/Kota Periode 2020

Laporan Statistik Migrasi dari masing-masing provinsi di Indonesia Hasil *Long Form* Sensus Penduduk Tahun 2020 (BPS, 2020) menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat ke-2 untuk migrasi ke luar risen di Indonesia, yakni 897.660 jiwa pada tahun 2020. Berdasarkan laporan tersebut, jumlah migrasi ke luar risen didominasi oleh penduduk perempuan, yakni 462.181 jiwa dan penduduk laki-laki sebanyak 435.479 jiwa. Migrasi risen menurut BPS merupakan kondisi yang menggambarkan kabupaten/kota tempat tinggal seorang migran pada 5 tahun yang lalu berbeda dengan kabupaten/kota tempat tinggal sekarang. Sebaliknya, ketika melihat data migrasi ke luar seumur hidup dari

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, angkanya merupakan yang tertinggi di Indonesia (Gambar 1.2).

Laporan Statistik Migrasi dari masing-masing provinsi di Indonesia Hasil *Long Form* Sensus Penduduk Tahun 2020 (BPS, 2020), menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bermigrasi ke luar seumur hidup dari Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mencatat angka tertinggi di Indonesia, yakni 8,6 juta jiwa pada tahun 2020 (tidak termasuk penduduk yang bermigrasi ke luar negeri).

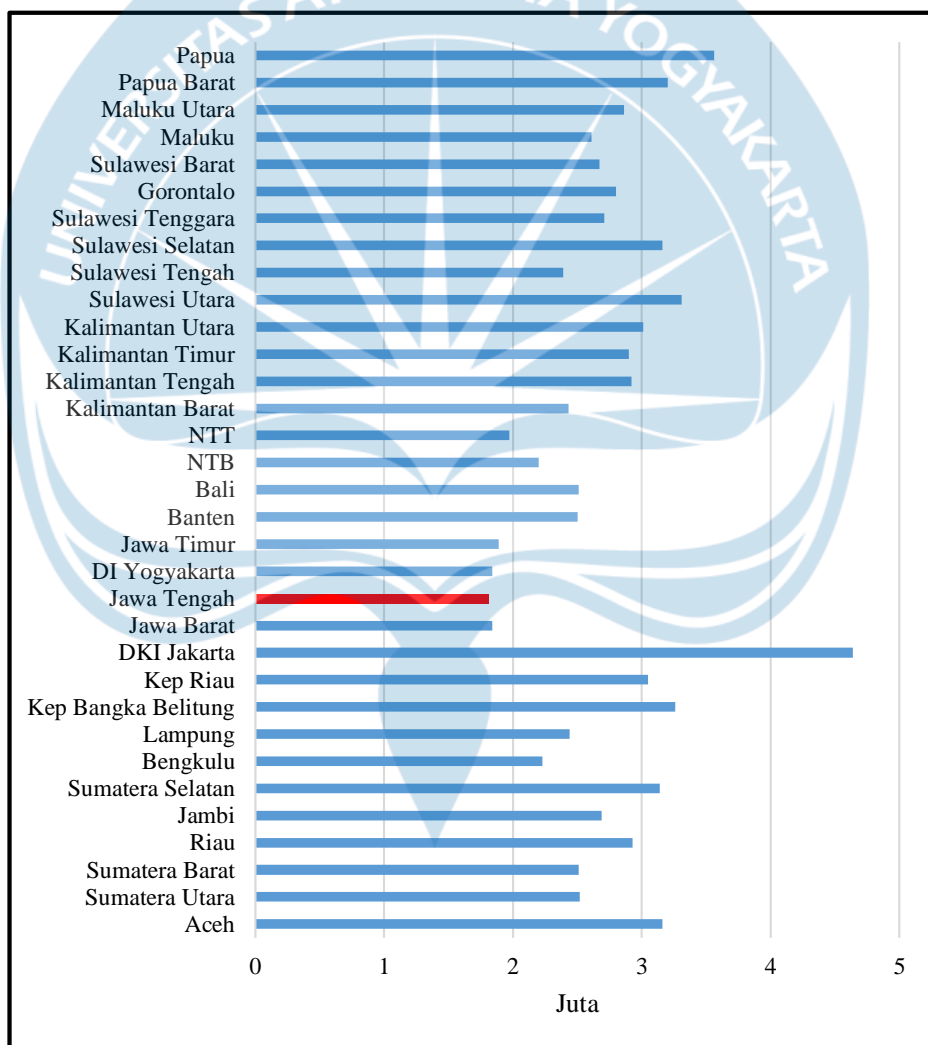


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 1. 2 Lima Provinsi dengan Migrasi ke Luar Seumur Hidup Terbesar Menurut Kabupaten/Kota Periode 2020

Besarnya jumlah penduduk yang bermigrasi ke luar dari Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah menandakan bahwa daerah-daerah tersebut memiliki daya pendorong yang kuat untuk ke luar wilayah sedangkan daya tariknya yang kurang. Oleh karena itu, pemilihan Jawa Tengah sebagai lokasi penelitian didasarkan pada fakta bahwa migrasi ke luar, baik dalam jangka waktu tertentu maupun seumur hidup dari kabupaten/kota di provinsi tersebut menunjukkan angka yang tinggi di Indonesia.

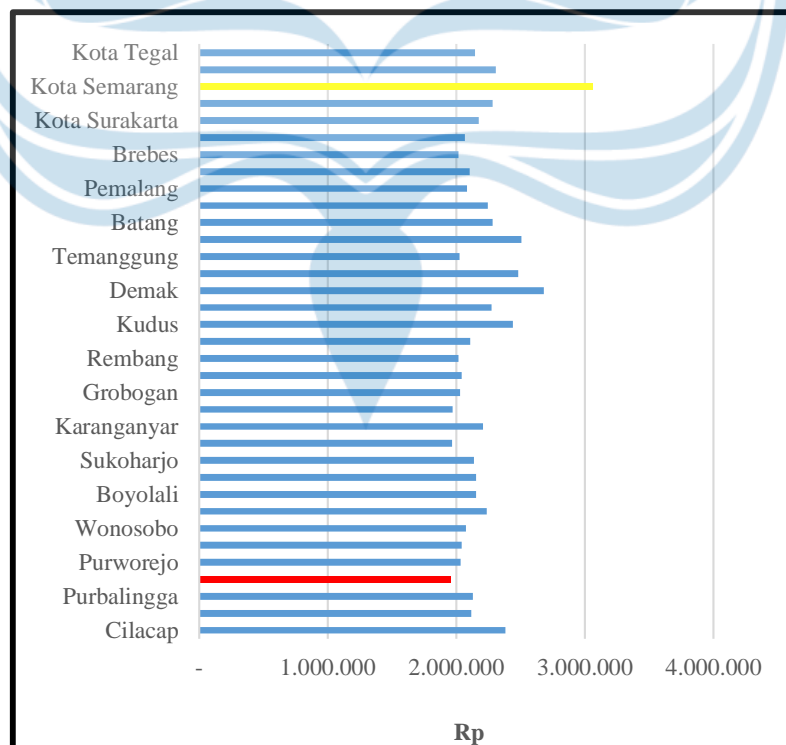
Akan tetapi, fokus penelitian ini lebih ditujukan pada migrasi ke luar risen karena migrasi risen dapat mencerminkan perubahan jumlah populasi dan memiliki batasan waktu, sedangkan dalam migrasi seumur hidup tidak terdapat batasan waktu dan hanya mencerminkan dorongan migrasi sejak lahir. Penelitian akan lebih berfokus pada dinamika migrasi ke luar risen dari Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023

Gambar 1. 3 Data UMP di Indonesia Tahun 2022

Berkaitan dengan penjelasan Todaro dan Smith (2011) yang mengatakan bahwa tenaga kerja akan melakukan migrasi ke luar apabila pendapatan di daerah tujuan lebih besar dari pada daerah asal, maka upah minimum di suatu daerah menjadi salah satu faktor bagi penduduk untuk bermigrasi ke daerah lain karena dengan pekerjaan yang sama imigran dapat memperoleh upah yang jauh lebih tinggi. Selain angka migrasi ke luar Kabupaten/kota di Jawa Tengah termasuk yang tinggi, alasan peneliti memilih Jawa Tengah sebagai fokus penelitian juga didukung oleh Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah merupakan yang terendah di Indonesia. Statistik Migrasi Indonesia Tahun 2023 mencatat upah minimum Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 sebesar 1,81 juta rupiah, lebih rendah daripada Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada tahun sebelumnya menjadi provinsi dengan UMP terendah di Indonesia (Gambar 1.3).



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Gambar 1. 4 Data UMK di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Gambar 1.4 menunjukkan daerah di Provinsi Jawa Tengah sendiri yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) rendah, meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Sragen. Sedangkan, daerah dengan UMK tertinggi berada di Kota Semarang, yakni sebesar Rp 3,06 juta. Rendahnya upah minimum di suatu daerah menyebabkan seorang individu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan seringkali berdampak pada tingkat hidup yang rendah. Individu dengan tingkat hidup yang rendah biasanya akan memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan yang kurang berkualitas, serta infrastruktur yang buruk. Adanya ketidakpuasan terhadap kondisi tersebut dapat mendorong mereka untuk mencari peluang ekonomi yang lebih tinggi di daerah lain agar mampu memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-harinya serta mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun di sisi lain, rendahnya upah minimum di suatu daerah juga berdampak pada daya saing yang rendah karena daerah tersebut kehilangan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman, sehingga cenderung menarik atau mempertahankan tenaga kerja yang kurang terlatih untuk tetap tinggal di daerah asalnya.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan sebuah ukuran penting guna mengevaluasi aksesibilitas, keterjangkauan, dan kesetaraan pendidikan dalam masyarakat. APM menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan penduduk pada jenjang pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya. Tingginya tingkat dari APM menandakan banyak pula individu yang berpartisipasi dalam pendidikan sehingga menjadi indikator positif untuk pembangunan manusia dan perkembangan sosial sosial ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan Laporan Statistik Pendidikan

Provinsi Jawa Tengah tahun 2022, APM di Jawa Tengah cenderung semakin menurun seiring dengan jenjang pendidikan yang terus meningkat. Tahun 2022, rata-rata penduduk di Jawa Tengah mampu menempuh pendidikan selama 7,93 tahun atau hanya menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan kelas VIII. Tercatat bahwa APM pada jenjang SMP/MTS sebesar 81,02 persen dan jenjang SMA/MA sebesar 61,17 persen. Total APM pada masing-masing jenjang pendidikan tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan total APM pada jenjang SD/MI, yakni sebesar 98,39 persen. Sedangkan, APM pada jenjang Perguruan Tinggi (PT) hanya sebesar 16,90 persen.

Nilai APM yang rendah di suatu daerah menunjukkan bahwa akses pendidikan formal di daerah tersebut terbatas serta kualitas pendidikan yang buruk. Penduduk yang berada dalam situasi ini akan merasa bahwa peluang untuk mendapatkan keterampilan dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam pekerjaan yang layak akan lebih rendah sehingga mendorong mereka untuk bermigrasi ke luar guna mencari pendidikan dan peluang ekonomi yang lebih baik. Tidak dapat dipungkiri, pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya hanya membutuhkan pendidikan tingkat dasar atau tingkat menengah sekarang mengharuskan adanya ijazah perguruan tinggi, sehingga kemungkinan memperoleh pekerjaan di sektor modern akan lebih besar bagi tenaga kerja dengan keterampilan tinggi di mana selisih pendapatan yang diharapkan juga lebih tinggi. Di sisi lain, individu yang mampu mengakses pendidikan formal mencerminkan bahwa keterampilan dan kualifikasi mereka lebih baik dibandingkan dengan individu yang aksesnya terbatas dalam pendidikan formal, sehingga membuat mereka akan lebih kompetitif di dalam pasar tenaga

kerja dan cenderung kurang tertarik untuk bermigrasi ke luar. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki lebih banyak informasi dan akses terkait peluang kerja di daerah tempat tinggal sehingga membuat mereka termotivasi untuk tetap tinggal dan berkontribusi terhadap pembangunan lokal daripada bermigrasi ke luar daerah.

Tidak hanya tingkat pendidikan yang menjadi tolak ukur seorang individu dalam pengambilan keputusan untuk bermigrasi. Proporsi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menurut lapangan usaha atau sektor ekonomi juga mempengaruhi migrasi. Proporsi PDRB menurut lapangan usaha mencerminkan kontribusi relatif dari masing-masing sektor ekonomi terhadap total PDRB di suatu wilayah. Dilihat dari sisi kesempatan kerja, sektor ekonomi yang memiliki proporsi PDRB tinggi biasanya menawarkan lebih banyak kesempatan dan menciptakan peluang kerja yang lebih baik. Keadaan tersebut kemungkinan akan mengurangi tingkat migrasi ke luar karena penduduk akan cenderung memilih tetap tinggal di daerah asal untuk bekerja di sektor ekonomi dengan proporsi PDRB yang tinggi. Sebaliknya, penurunan proporsi PDRB pada sektor ekonomi tertentu dapat mendorong penduduk untuk melakukan migrasi ke luar karena kurangnya peluang kerja dan pendapatan yang kurang memadai. Selain itu, tingkat proporsi PDRB dalam suatu lapangan usaha yang rendah juga mempengaruhi kualitas hidup di suatu daerah, seperti akses terhadap pendidikan maupun kesehatan. Apabila suatu daerah tidak mampu memberikan layanan yang memadai terhadap penduduknya, maka hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor pendorong penduduk untuk bermigrasi guna mendapatkan kualitas hidup yang layak. Todaro dan Smith

(416:2011) menjelaskan bahwa pada dasarnya para migran mempertimbangkan berbagai peluang pasar tenaga kerja yang tersedia, baik di sektor pedesaan maupun sektor perkotaan lalu memilih sektor yang dianggap mampu memaksimalkan hasil yang mampu memberikan kesejahteraan hidup.

Berdasarkan hal-hal di atas yang berkaitan dengan faktor-faktor pendorong seorang individu melakukan migrasi ke daerah lain, maka penelitian ini menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten (UMK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan proporsi PDRB menurut lapangan usaha terhadap migrasi ke luar risen di Jawa Tengah periode 2010 – 2020 untuk melihat seberapa besar faktor-faktor pendorong di atas mempengaruhi aktivitas migrasi ke luar di Jawa Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) terhadap migrasi ke luar risen di Jawa Tengah pada periode 2010 – 2020?
2. Bagaimana pengaruh Angka Partisipasi Murni (APM) terhadap migrasi ke luar risen di Jawa Tengah pada periode 2010 – 2020?
3. Bagaimana pengaruh proporsi Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha terhadap migrasi ke luar di Jawa Tengah pada periode 2010 – 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten/kota terhadap migrasi ke luar negeri di Jawa Tengah pada periode 2010 – 2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Angka Partisipasi Murni terhadap migrasi ke luar negeri di Jawa Tengah pada periode 2010 – 2020.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh proporsi Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha terhadap migrasi ke luar negeri di Jawa Tengah pada periode 2010 – 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah Jawa Tengah, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dengan harapan agar terwujud pemerataan pendapatan sehingga penduduk di Jawa Tengah tidak bermigrasi ke luar negeri menuju daerah lain.
2. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai migrasi ke luar negeri agar dapat menjadi tambahan informasi yang memberikan pandangan tentang dinamika dan tujuan migrasi sehingga mampu menjadi landasan penting bagi penelitian selanjutnya dalam mengeksplorasi lebih lanjut terkait migrasi ke luar negeri.

1.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya dan pertimbangan pada penelitian terdahulu serta teori ekonomi yang ada, maka hipotesis yang hendak dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Diduga Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh terhadap migrasi ke luar risen di Jawa Tengah pada periode 2010 – 2020.
2. Diduga Angka Partisipasi Murni (APM) berpengaruh terhadap migrasi ke luar risen di Jawa Tengah pada periode 2010 – 2020.
3. Diduga proporsi Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha berpengaruh terhadap migrasi ke luar risen di Jawa Tengah pada periode 2010 – 2020.

1.6 Sistematika Penulisan

Rencana sistematika penulisan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab I dalam penelitian ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab II dalam penelitian ini akan menjelaskan dan menguraikan teori mengenai upah minimum, angka partisipasi murni, dan beberapa sektor proporsi PDRB yang meliputi sektor pertanian, sektor pengolahan, sektor konstruksi dan *real estate*, sektor perdagangan, dan sektor jasa terhadap migrasi ke luar risen.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab III dalam penelitian ini ini terdiri dari data dan sumber data, definisi operasional dan pengukuran data, kerangka pemikiran konseptual, alat analisis data, model teoritis, tahapan analisis data, tahapan pemilihan model, dan uji hipotesis.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV dalam penelitian ini akan menjelaskan dan menguraikan hasil serta pembahasan yang diperoleh dari tahapan analisis data pada model yang dipilih dan alat analisis data yang telah diestimasi.

BAB V. PENUTUP

Bab V dalam penelitian ini akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta memberikan saran kepada pihak-pihak yang relevan dengan penelitian ini.